

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian berjudul "Pengaruh Kualitas Institusi Politik Terhadap Transisi Energi di Kawasan ASEAN-9" menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Demokrasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap konsumsi energi terbarukan per kapita. Artinya, semakin baiknya kualitas demokrasi suatu negara, justru cenderung diiringi dengan menurunnya tingkat konsumsi energi terbarukan per kapita di negara tersebut. Kondisi ini dapat dipahami melalui dua mekanisme. Pertama, dampak demokratisasi terhadap transisi energi bersifat kontekstual terhadap tahapan pembangunan ekonomi suatu negara; pada negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang relatif maju, preferensi publik dalam sistem demokrasi tidak selalu berorientasi pada akselerasi energi terbarukan, melainkan turut mempertimbangkan stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga energi yang masih banyak dipenuhi oleh energi fosil. Kedua, keterbukaan ruang partisipasi politik dalam sistem demokrasi turut memberi akses bagi kelompok-kelompok berkepentingan di sektor energi fosil untuk memengaruhi proses legislasi, sehingga kebijakan transisi energi rentan mengalami perlambatan akibat dinamika lobi tersebut.
2. Indeks Korupsi Politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konsumsi energi terbarukan per kapita di kawasan ASEAN-9. Artinya, semakin tingginya tingkat korupsi politik di suatu negara akan diiringi dengan menurunnya konsumsi energi terbarukan per kapita, dan sebaliknya, perbaikan kualitas institusi politik yang tercermin dari menurunnya indeks korupsi terbukti mendorong peningkatan konsumsi energi terbarukan. Temuan ini konsisten dengan kerangka teori ekonomi institusional, yang menegaskan bahwa institusi yang terjerat praktik korupsi berisiko mengalami distorsi sistemik dalam eksekusi kebijakan, termasuk kebijakan transisi energi yang seharusnya diarahkan untuk kepentingan publik jangka panjang. Dalam konteks ini, korupsi memperlemah konsistensi kebijakan energi dan membuka celah bagi

kelompok kepentingan industri berbasis energi fosil untuk mengintervensi proses legislasi dan alokasi anggaran, sehingga menghambat akselerasi transisi menuju energi terbarukan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

3. Indeks Efektivitas Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi energi terbarukan per kapita, meskipun arah koefisiennya positif dan sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan. Lemahnya pengaruh ini lebih tepat dimaknai sebagai cerminan dari kondisi kapasitas pemerintahan di kawasan ASEAN yang mayoritas negara sampelnya masih berada pada tahapan pembangunan dengan tingkat efektivitas institusi yang belum sepenuhnya matang. Pola konsumsi energi terbarukan di kawasan ini pada dasarnya masih lebih banyak dibentuk oleh faktor-faktor struktural seperti ketersediaan sumber daya alam, ketergantungan historis terhadap energi tradisional, serta keterbatasan infrastruktur energi modern, dibandingkan oleh kapasitas birokrasi pemerintah semata. Koefisien positif yang ditemukan mengindikasikan bahwa perbaikan efektivitas pemerintah berpotensi menjadi katalis transisi energi di masa mendatang, meskipun dampaknya belum terukur secara signifikan dalam rentang waktu yang diteliti.
4. PDB Per Kapita sebagai variabel kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi energi terbarukan per kapita, meskipun dengan besaran koefisien yang sangat kecil yakni $7,84e-07$. Meskipun hubungan tersebut terbukti secara statistik, kekuatan pengaruhnya yang sangat lemah mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan per kapita saja tidak cukup untuk secara substantif menggerakkan perubahan dalam pola konsumsi energi terbarukan di kawasan ASEAN. Hal ini mengindikasikan bahwa pilihan sumber energi suatu negara jauh lebih ditentukan oleh faktor-faktor struktural seperti ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur energi yang telah terbangun, arah kebijakan energi yang berlaku, serta ketergantungan historis terhadap sumber energi tertentu, ketimbang semata-mata oleh besaran pendapatan per kapitanya.
5. Secara simultan, Indeks Demokrasi, Indeks Korupsi Politik, dan Indeks Efektivitas Pemerintah sebagai proksi institusional berpengaruh signifikan terhadap konsumsi energi terbarukan per kapita di kawasan ASEAN-9. Pola

hubungan yang terbentuk menunjukkan bahwa transisi energi di kawasan ini belum sepenuhnya merupakan produk dari perbaikan tata kelola kelembagaan secara konvensional, melainkan masih sangat dipengaruhi oleh kondisi struktural, geografis, serta dinamika politik-ekonomi yang khas pada masing-masing negara, sehingga kerangka teori institusional yang umumnya berlaku pada konteks negara maju perlu dimaknai secara lebih cermat ketika diaplikasikan pada kawasan negara berkembang seperti ASEAN.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan pada penelitian ini, dirumuskan sejumlah saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Teoritis

1. Peneliti selanjutnya yang berminat melanjutkan topik ini disarankan untuk memperkaya proksi institusional yang digunakan, misalnya dengan menyertakan indikator kerangka regulasi energi, stabilitas politik, maupun kapasitas penegakan kebijakan lingkungan. Penambahan proksi tersebut diharapkan dapat menangkap dimensi kelembagaan yang lebih spesifik terhadap isu transisi energi, bukan sekadar kualitas institusi politik secara umum.
2. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk mempertimbangkan pendekatan yang dapat menangkap sifat kondisional (*moderating effect*) dari tingkat pembangunan ekonomi terhadap hubungan antara kualitas institusi dan konsumsi energi terbarukan, misalnya dengan membagi sampel negara ke dalam kelompok berdasarkan tingkat pendapatan, atau menambahkan variabel interaksi antara indeks institusional dengan PDB Per Kapita. Pendekatan ini relevan mengingat temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa arah hubungan antara demokrasi dan transisi energi dapat berbeda bergantung pada tahapan pembangunan ekonomi suatu negara.
3. Dari sisi cakupan indikator transisi energi, penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya mengandalkan konsumsi energi terbarukan per kapita sebagai proksi tunggal, melainkan turut mempertimbangkan dimensi lain dari transisi energi, seperti intensitas energi, efisiensi pemanfaatan energi, atau

tingkat dekarbonisasi sektor energi, sepanjang data yang representatif untuk kawasan ASEAN dapat tersedia.

4. Dari sisi rentang waktu, penelitian selanjutnya dapat memperluas periode pengamatan ke belakang maupun ke depan, mengingat dinamika kebijakan energi dan institusi politik di kawasan ASEAN terus mengalami perubahan, sehingga periode pengamatan yang lebih panjang berpotensi menangkap pola hubungan jangka panjang yang lebih komprehensif antara kualitas institusi dan transisi energi.

5.2.2 Saran Praktis

1. Bagi pemerintah negara-negara ASEAN, mengingat temuan bahwa peningkatan kualitas demokrasi belum secara otomatis mendorong percepatan konsumsi energi terbarukan, diperlukan upaya yang lebih terarah dalam merumuskan kebijakan transisi energi agar tidak semata-mata mengandalkan proses demokratisasi, melainkan disertai dengan komitmen kebijakan yang konkret, seperti pemberian insentif fiskal bagi investasi energi terbarukan dan pembatasan subsidi terhadap energi fosil, sehingga kepentingan kelompok-kelompok berbasis energi fosil tidak mendominasi arah kebijakan energi nasional.
2. Bagi lembaga pengawas dan antikorupsi, meskipun temuan penelitian ini menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat korupsi dan konsumsi energi terbarukan melalui mekanisme informal, hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai justifikasi untuk mentoleransi praktik korupsi. Pemerintah tetap perlu memperkuat tata kelola birokrasi secara formal, khususnya dalam hal penyederhanaan proses perizinan proyek energi terbarukan, sehingga akselerasi transisi energi dapat dicapai melalui jalur institusional yang sah dan berkelanjutan, tanpa bergantung pada mekanisme informal yang berisiko tinggi.
3. Bagi pemerintah, mengingat efektivitas pemerintah belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap konsumsi energi terbarukan, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan energi yang telah berjalan, khususnya terkait konsistensi regulasi dan alokasi anggaran untuk sektor energi

terbarukan, agar kapasitas birokrasi yang dimiliki dapat lebih dioptimalkan untuk mendukung target transisi energi jangka panjang.

4. Bagi lembaga penelitian dan akademisi, diharapkan dapat lebih banyak mengembangkan kajian lintas disiplin yang menghubungkan ekonomi politik dengan kebijakan energi dan lingkungan, mengingat dinamika institusi politik dalam penelitian ini terbukti memiliki keterkaitan signifikan dengan capaian transisi energi, sehingga pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi keduanya dapat memberikan landasan yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan energi berkelanjutan di kawasan ASEAN.